

The Role of Social Services in Poverty Reduction in Medan City

Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Medan

Sri Sudiarti ¹⁾; Siti Rama Hasibuan ²⁾

^{1,2)} *Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*

Email: ¹⁾ srisudiarti@uinsu.ac.id; ²⁾ sitiramahasibuan@gmail.com

How to Cite :

Sudiarti, S., Hasibuan, S. R. (2022). *The Role of Social Services in Poverty Reduction in Medan City*. JURNAL EMBA REVIEW, 2(1). DOI: <https://doi.org/10.53697/emba.v2i1>

ARTICLE HISTORY

Received [10 April 2022]

Revised [20 April 2022]

Accepted [25 April 2022]

KEYWORDS

Social Service, Poverty

Reduction, Program

Synergy

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang ingin ditanggulangi oleh program bakti sosial di Medan. Meskipun inisiatif pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan, tidak ada bukti yang tersedia untuk menjelaskan keberhasilannya. Berkaitan dengan masalah penelitian, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang fungsi dinas sosial kota Medan dalam penanggulangan kemiskinan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan fokus kualitatif. Wawancara terstruktur, studi dokumentasi hasil studi sebelumnya, makalah dan literatur yang relevan, dan observasi digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi. Sebagai sumber informasi digunakan petugas dinas sosial dan instansi sektoral terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi dinas sosial Kota Medan dalam pengentasan kemiskinan belum maksimal. Hal ini disebabkan karena jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang masih terbatas, anggaran yang masih belum mendukung, koordinasi yang masih kurang, serta sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan program masih terbatas. Dinas sosial harus meningkatkan koordinasi dan sinergi program dengan instansi terkait di daerah, serta meningkatkan intensitas diskusi dengan dinas sosial provinsi dan pusat, berdasarkan temuan penelitian.

ABSTRACT

Poverty is one of the social problems that the social service program in Medan wants to overcome. Although poverty alleviation initiatives have been implemented, no evidence is available to explain their success. Regarding the research problem, this research was conducted with the aim of knowing more about the function of the social service of the city of Medan in poverty alleviation. The research method used is descriptive with a qualitative focus. Structured interviews, documentation studies of previous studies, relevant papers and literature, and observations were used to collect data and information. As a source of information, social service officers and related sectoral agencies are used. The results of the study indicate that the function of the social service of Medan City in alleviating poverty has not been maximized. This is because the number and quality of human resources are still limited, the budget is still not supported, coordination is still lacking, and the facilities and infrastructure needed for program implementation are still limited. The social service agency must improve program coordination and synergy with relevant agencies in the regions, as well as increase the intensity of discussions with provincial and central social services, based on research findings.

PENDAHULUAN

Pusat dan Pemerintah Daerah berbagi tanggung jawab dalam pembangunan kesejahteraan sosial, terutama pengentasan kemiskinan. Kemiskinan merupakan program prioritas nasional yang memerlukan kesepakatan dan komitmen dari seluruh jajaran pemerintahan. Pengentasan

kemiskinan di Indonesia pasti akan dipercepat jika pemahaman dan tekad yang sama diterapkan. Kemiskinan di Kota Medan merupakan salah satu permasalahan kemasyarakatan yang harus ditangani oleh Pemerintah Kota Medan. Menurut data Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Medan tahun 2012, jumlah penduduk miskin kota Medan adalah 8.145 kepala keluarga. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang paling signifikan jika dibandingkan dengan masalah sosial lainnya. Kemiskinan ini telah menimbulkan masalah sosial baru, seperti penelantaran anak dan pengasuhan anak keluarga yang tidak memadai, selain jumlah penduduk yang menonjol.

Kemiskinan di Kota Medan memerlukan keterlibatan pemerintah khususnya Dinas Sosial Kota Medan dalam menjalankan tugas dan kegiatannya. Salah satu tugas dan fungsi dinas sosial seperti diketahui adalah menyelenggarakan program-program kesejahteraan sosial, salah satunya penanggulangan kemiskinan. Sumber daya manusia, infrastruktur, anggaran (APBD), dan dukungan manajemen semuanya diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi dinas sosial. Jika banyak karakteristik ini ditangani, tujuan program akan terpenuhi secara maksimal, dan sebaliknya.

Salah satu urusan wajib yang dilaksanakan di daerah adalah urusan sosial, termasuk bidang kesejahteraan sosial, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada akhirnya menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Undang-undang tersebut bertujuan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah dengan kebutuhan objektif masyarakat. Penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat ditangani secara cepat dan tuntas dalam konteks sektor kesejahteraan sosial. Pemerintah daerah dapat menanggung beban dan tugas pemerintah federal yang tidak perlu di bawah kebijakan otonomi daerah.

LANDASAN TEORI

Tujuan otonomi daerah belum terwujud secara maksimal. Berbagai penelitian dan kajian yang dilakukan oleh Pusat Studi Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gajah Mada, serta materi yang dipublikasikan di media, menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah masih menghadapi tantangan yang cukup berat. Daerah mengalami kesulitan sosial, yang paling terlihat adalah kasus korupsi pejabat daerah. Kemudian, selain persoalan hukum, otonomi daerah masih ditandai dengan rendahnya daya dukung daerah di bidang kesejahteraan sosial, terutama dalam hal sumber daya manusia, pendanaan APBD, dan sarana prasarana. jauh dari norma.

Pemerintah daerah telah menerima peningkatan program dari pusat di era otonomi daerah ini. Kementerian Sosial telah mendistribusikan program dan sumber daya untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui hibah dekonsentrasi. Hal ini dimaksudkan agar melalui penguatan program dan anggaran, pemerintah daerah dapat memberikan kinerja yang terbaik. Tahun demi tahun, penduduk miskin dapat dikurangi. Program-program yang dipasok dari pusat, sebaliknya, sifatnya mendukung dan tidak berperan lebih besar. Program pengentasan kemiskinan harus lebih banyak dialokasikan ke daerah. Menurut Dwiyanto dkk. (2003), masalah pengentasan kemiskinan tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat setelah otonomi daerah. Dengan kata lain, upaya untuk memerangi kemiskinan telah berkembang menjadi isu regional yang bergantung pada keterlibatan pemerintah daerah. Kemiskinan harus menjadi agenda utama pemerintah kota. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah yang didukung oleh kapasitas untuk melaksanakan program-program yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan, yang merupakan isu strategis yang harus dibahas dan didiskusikan secara kolektif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan strategi deskriptif yang dipadukan dengan pendekatan kualitatif. Kota Medan dipilih sebagai lokasi penelitian karena menurut informasi awal, Dinas Sosial Kota Medan masih menghadapi sejumlah tantangan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Padahal, pengentasan kemiskinan merupakan tanggung jawab dan fungsi Dinas Sosial, dan di era otonomi daerah, urusan sosial menjadi urusan yang harus dilakukan. Di Kota Medan, informan penelitian meliputi petugas dinas sosial dan dinas sektoral. Wawancara terstruktur, studi dokumentasi, dan tinjauan penelitian sebelumnya, laporan, dan literatur yang relevan digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi. Setelah itu, informasi tersebut diolah dan dinilai secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan memiliki beberapa masalah, mulai dari sumber masalahnya dan kebijakan yang diterapkan untuk mengatasinya. Kemiskinan di Kota Medan merupakan masalah sosial ekonomi multifaset yang meliputi pendapatan rendah, kesehatan dan pendidikan yang buruk, perumahan dan ketidakamanan pribadi, serta ketidakberdayaan. Akibatnya, orang miskin terpaksa tinggal di komunitas yang tidak layak huni, dengan akses terbatas ke perawatan kesehatan, pendidikan dasar, dan peluang kerja. Situasi ini sejalan dengan Roebyantho, dkk. (2011) yang menyatakan bahwa kemiskinan lebih sering dikonseptualisasikan dalam pengertian kurangnya pendapatan dan aset (lack of income and assets) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan (bidang pendidikan). dimensi ekonomi) dan memenuhi kebutuhan sosial, lingkungan, pemberdayaan, dan tingkat partisipasi (ruang lingkup dimensi non-ekonomi). Mereka memiliki pemikiran sendiri tentang kesejahteraan sosial dan bagaimana mengukurnya, oleh karena itu pemerintah dan pihak lain yang berkepentingan harus turun tangan dalam pembangunan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Menurut hasil penelitian dan berbagai penelitian, kemiskinan dan masalah sosial disebabkan oleh kekuatan internal dan eksternal. Penyebab internal, seperti tidak terpenuhinya kebutuhan pokok sehari-hari, tidak mampu menjalankan peran sosial, dan tidak mampu mengatasi masalah sosial. Kemudian ada faktor eksternal, seperti kebijakan publik yang tidak kondusif, kurangnya pelayanan sosial dasar, hak kepemilikan tanah yang tidak terlindungi, kesempatan kerja yang terbatas, sistem ekonomi kerakyatan yang kurang, ketimpangan, dan ketidakadilan sosial, serta dampak kapitalisasi. pembangunan yang berorientasi

Masalah sosial kota Medan semakin kompleks, dan semakin parah saja. Situasi ini mengharuskan Pemerintah Kota Medan memprioritaskan pelaksanaan program kesejahteraan sosial. Hal ini penting mengingat pertumbuhan penduduk kota Medan dan kompleksitas masalah sosial ekonominya. "Di Kota Medan yang bermasalah sebagian besar adalah warga Medan, namun sebagian besar adalah pendatang, seperti gelandangan, rusunawa, anak jalanan, pemulung, dan WTS, banyak yang bermukim di lingkungan ampas," kata Kapolsek. dari Dinas Sosial. Sebaliknya, pemerintah berupaya mengatasi masalah PMKS melalui dinas sosial dengan mengkoordinir beberapa SKPD terkait. Menurut data dan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, kinerja Dinas Sosial Kota Medan sebagai aparatur sektor sosial daerah belum maksimal, hal ini terlihat dari minimnya sarana dan prasarana penunjang kinerja Dinas Sosial, serta kekurangan sumber daya manusia. Masih banyak masyarakat yang salah paham dengan program pelayanan pemerintah daerah. Akibatnya, masyarakat tidak menyadari atau tidak dapat menggunakan layanan kesejahteraan sosial yang disediakan pemerintah.

Hampir setiap SKPD di Kota Medan melakukan kegiatan penanggulangan kemiskinan, menurut data lapangan. Sedangkan Dinas Sosial bertanggung jawab menangani PMKS lainnya. Namun, seperti yang diungkapkan oleh informan, bantuan bagi masyarakat yang memiliki masalah sosial yang mendesak dan darurat masih kurang mendapat perhatian, sehingga pengelolaannya tidak tuntas. Hal yang sama dapat dikatakan untuk program-program yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan. Sulit untuk melacak dan mengevaluasi program penanggulangan kemiskinan karena didistribusikan di antara beberapa SKPD. Tumpang tindih dalam pelaksanaan program tidak dapat dihindari.

Di Kota Medan, potensi pengentasan kemiskinan dan masalah sosial dapat diciptakan dan dimanfaatkan. Berikut beberapa potensi dan sumbernya:

Sumber Daya Manusia 25,38 persen penduduk tamat SLTA, dan 6,15 persen tamat perguruan tinggi/akademik (BPS Kota Medan 2012). Hal ini tidak terlepas dari prestasi Pemerintah Kota Medan dalam bidang pendidikan, serta keterlibatan masyarakat yang mengakui nilai pendidikan. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan membaca dan menulis penduduk Kota Medan pada tahun 2012 yang tercatat sebesar 99,68 persen.

Sumber daya alam untuk bertani, berkebun, dan kolam ikan yang dapat memberikan sumber pendapatan bagi masyarakat setempat. Pembangunan ekonomi meliputi pembangunan produksi tanaman pangan. Tujuan pembangunan di bidang ini adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani pada khususnya, serta masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas makanan yang dihasilkan

Potensi kepesertaan kesejahteraan sosial (PSKS) di Kota Medan yang meliputi 22 organisasi sosial kemasyarakatan, Pekerja Sosial Masyarakat, Karang Taruna, Panti Asuhan Anak, Panti Jompo, dan adanya Lokakarya Bina Lingkungan (LBK) sebagai tempat pengabdian dan bimbingan sosial bagi penyandang masalah sosial. Ada dua Balai Latihan Kerja (swasta) dan 23 lembaga pelatihan swasta..

KESIMPULAN DAN SARAN

Temuan penelitian ini mengarah pada kesimpulan bahwa peran Dinas Sosial Kota Medan dalam program penanggulangan kemiskinan belum tepat. Pemerintah daerah belum menjadikan program pengentasan kemiskinan sebagai prioritas yang berdampak negatif terhadap pelaksanaan program di Dinas Sosial Kota Medan. Keterlibatan Dinas Sosial dalam pengentasan kemiskinan belum optimal, dan hal ini ditentukan oleh beberapa variabel, antara lain sumber daya manusia, infrastruktur, dan keuangan APBD yang belum memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, W. (2010), Kajian tentang "Peran Dinas Sosial Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial", Jakarta. Kementerian Sosial. RI
- Dwiyanto, A., dkk, (2003), Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada
- Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana Kota Medan 2009 - 2013. Dinas Sosial Kota Medan
- Republik Indonesia, (2004). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta, RI
- Republik Indonesia, (2010). Permendagri No.42 2010 tentang tugas dan fungsi Bappeda dan SK Tim Kordinasi Penangulangan Kemiskinan di daerah. Jakarta, RI
- Republik Indonesia, (2011). Undang- undang RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Jakarta, RI
- Roebyantho, H., Gati, S, S., Rahman, A. (2011), Dampak Sosial Ekonomi Program Penanganan Kemiskinan Melalui Kube. Jakarta:P3KS